

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada subbab ini akan disajikan tinjauan pustaka untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian supaya berjalan dengan baik, maka penulis merasa perlu untuk memahami dan mendalami teori apa saja yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam pembahasan penelitian dengan masalah analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa teori yang relevan terhadap pembahasan tersebut.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah, yang dimaksud dengan nilai tambah bruto ialah kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi ataupun nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara (*intermediate cost*) nilai tambah bruto ini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

Dalam BPS metode perhitungan produk domestik bruto dapat menggunakan dua harga, yaitu:

- a. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku merupakan PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan, baik pada saat menilai

produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah. PDRB ini dikategorikan berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, digunakan untuk melihat kondisi perekonomian pada tahun tersebut.

b. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan merupakan PDRB yang dinilai berdasarkan harga barang ataupun jasa pada tahun tertentu/ tahun dasar, baik itu pada saat menilai produksi, biaya maupun komponen nilai tambah. PDRB ADHK dipergunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau bisa juga mengetahui pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena untuk menjadi dasar dalam perhitungan Indeks Williamson dan mengetahui pola atau struktur perekonomian di wilayah kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masalah pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Kebijakan pemerintah daerah harus dirancang secara tepat agar pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tercapai dan dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Prasetya, 2018).

2.1.2 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diperlukan guna menyongsong keberlangsungan hidup masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang. Akan tetapi, peranan pembangunan ekonomi lebih besar mengarah pada negara-negara yang sedang berkembang dan perekonomiannya belum stabil. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses ataupun usaha masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dan mengembangkan kegiatan ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat diiringi dengan terciptanya masyarakat sejahtera (Sukirno, 2006:423).

Menurut Arsyad (2004) pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai tahapan atau proses yang dijalani oleh setiap negara dan menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk di suatu negara tersebut dalam jangka panjang juga disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Maka pembangunan ekonomi dianggap sebagai suatu proses yang multidimensional, juga tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, penanganan dalam ketimpangan pendapatan serta harus mampu mengentaskan kemiskinan. Pembangunan ekonomi juga harus mampu dalam berbagai perubahan mendasar seperti struktur sosial, perilaku masyarakat, sistem kelembagaan, dan perbaikan serta modernisasi struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk memperbaiki suatu perekonomian negara dari awalnya perekonomian stagnan menjadi meningkat dan

dari awalnya berpendapatan rendah menjadi tinggi (Todaro dan Smith, 2011:290). Menurut Jhingan (2000:67) dalam pembangunan ekonomi terdapat 4 faktor yang menjadi modal dalam pembangunan, yaitu: sumber daya manusia (adanya ketersediaan tenaga kerja, motivasi dan pendidikan), sumber daya alam (lahan tanah, ketersediaan mineral, bahan bakar, dan iklim), pembentukan modal seperti jalan raya, dan peningkatan teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen juga kewiraswastaan).

Kajian mengenai pembangunan ekonomi hingga saat ini terus mengalami perkembangan dan menciptakan solusi yang relevan untuk dapat menciptakan kebijakan yang dapat mengejar dan meningkatkan ketertinggalan sebagai negara berkembang ke negara maju. Pemerintah di negara berkembang harus dapat menciptakan suatu kebijakan pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negaranya tanpa mengabaikan permasalahan umum yang terjadi, seperti permasalahan kemiskinan, ketimpangan juga permasalahan sosial lainnya (Rustianik, 2018:13).

2.1.3 Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (2004:298) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi untuk mengarahkan pengambilan inisiatif daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru

dan meningkatkan kegiatan atau sektor ekonomi yang ada, pembangunan institusi dan industri alternatif baru, identifikasi pasar, peralihan teknologi, peningkatan produksi, dan pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia.

Keadaan sosial ekonomi disetiap daerah berbeda-beda maka hal ini akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk setiap daerah juga akan berbeda. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah ini mengakibatkan perbedaan terhadap tingkat kesejahteraan daerah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi dan merugikan bagi daerah-daerah lain, karena adanya tenaga kerja, modal, perdagangan yang dilakukan akan berpindah kedaerah yang melakukan ekspansi tersebut. Hal ini sama seperti yang diungkapkan Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) mengenai dampak balik pada suatu daerah (Arsyad, 2010).

Menurut Arsyad (2010) masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan dan dengan diikuti potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal atau daerah. Ada beberapa teori yang dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah, salah satunya teori ekonomi neo klasik.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi. Perekonomian dalam suatu negara yang menjadi tolak ukur keberhasilan untuk program pembangunan yaitu dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting untuk

menganalisa mengenai pembangunan suatu negara ataupun daerah (Todaro, 2000:136).

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan produk domestik bruto ataupun pendapatan nasional bruto tanpa melihat peningkatan tersebut lebih besar ataupun sebaliknya dari pertumbuhan penduduk dan apa ada perubahan dari struktur ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan menekankan pada tiga aspek penting, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang (Meier dan Baldwin dalam Pujoalwanto, 2014:87). Menurut Boediono (1992:1) arti dari proses pertumbuhan ekonomi dapat melihat suatu perekonomian seiring dengan berjalannya waktu harus terus mengalami perkembangan dan perubahan. Begitupun dengan arti *output* per kapita, disini perlu untuk melihat dari *output* total (*Gross Domestic Product/ GDP*) dan dari jumlah penduduk, maka tidak bisa hanya melihat dari salah satu sisi saja, karena teori pertumbuhan ekonomi yang baik harus mampu untuk menjelaskan keduanya dan hasil akhirnya akan didapat perkembangan *output* per kapita. Selanjutnya arti dari jangka panjang yaitu pertumbuhan ekonomi haruslah dilihat dari peningkatan output perkapita dalam jangka panjang, bukan hanya satu ataupun dua tahun saja, karena dapat dikatakan tumbuh apabila suatu perekonomian dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan *output* per kapita.

2.1.4.2 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

2.1.4.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik dipelopori oleh Robert Sollow, dan diikuti oleh ahli ekonomi lain seperti Edmund Phelps, Harry Johnson, dan J.E. Meade. Dasar dari teori ini adalah pandangan dari para ekonom Klasik, maka teori ini disebut dengan teori pertumbuhan Neo-Klasik. Teori ini menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Menurut teori ini, laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan dari penawaran faktor-faktor produksi dan teknologi yang semakin maju. Asumsi teori ini didasarkan pada teori pertumbuhan Klasik dimana memiliki asumsi *full employment*, barang modal akan dipergunakan secara keseluruhan dari waktu ke waktu (Sukirno, 2006:264).

Pengikut dalam model Neo-Klasik beranggapan bahwa mobilitas dari faktor produksi, baik itu modal ataupun tenaga kerja, proses dalam pembangunan mulanya berjalan tidak sesuai, mengakibatkan modal dan tenaga kerja yang ada hanya cenderung terdapat dan terkonsentrasi di wilayah atau daerah lebih maju dalam perekonomiannya, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan regional yang semakin melebar. Bila pembangunan ini dalam prosesnya berjalan dengan terus menerus, dan dalam proses tersebut semakin meningkatnya fasilitas ataupun infrastruktur yang ada maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin meningkat. Dengan kondisi yang demikian, negara tersebut tidak hanya maju dalam segi pertumbuhan ekonomi, maka akan diikuti dengan berkurangnya ketimpangan pembangunan antar daerah (Sjafrizal, 2008).

Dengan mengetahui pola ataupun struktur ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kotanya. Pada teori ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi di DIY meningkat maka pembangunan ekonomi di daerah tersebut akan mengalami pemerataan dan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

2.1.4.2.2 Teori Trickle Down Effect

Di negara-negara yang sedang berkembang, teori *trickle down effect* merupakan salah satu topik penting dalam pembangunan ekonomi. Pada 1954, teori ini pertama kali digagas oleh Albert Otto Hirschman. Teori *trickle down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi dimana terciptanya distribusi dari hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori ini mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi akan terlebih dahulu dirasakan oleh penduduk kaya, kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin dapat memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya (Laksani, 2010).

Proses pemerataan dalam teori *trickle down effect* dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor utama dan kemudian sektor utama

tersebut akan menyebarkan hasil pertumbuhan ekonominya ke sektor lain, diharapkan akan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat. Istilah titik pertumbuhan (*Growing Point*) atau pusat pertumbuhan (*Growing Centre*) digunakan oleh Hirschman, karena dalam suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, di mana industri berkelompok berada pada titik pertumbuhan tersebut. Pada titik pertumbuhan tersebut diperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh industri yang bersangkutan. Maka Hirschman menyarankan agar dapat membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan agar dapat menciptakan pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif (Larasati dan Fadli, 2017).

Di pusat-pusat pertumbuhan terdapat lebih banyak kesempatan investasi, lapangan kerja, dan upah buruh yang relatif tinggi. Maka dari itu, investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diutamakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam teori *trickle down effect* ini. Dengan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, investasi diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan pada tahap selanjutnya akan mampu pemeratakan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat (Larasati dan Fadli, 2017).

2.1.4.2.3 Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik

Menurut Myrdal (1957) dalam Yuliantari (2011:23) Perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar wilayah akan selamanya menimbulkan *backwas effect* yang mendominasi *spread effect* juga pertumbuhan ekonomi

regional merupakan proses yang tidak ekuilibrium (*disequilibrium*). Pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses yang membuat si kaya mendapatkan keuntungan yang semakin banyak, akan tetapi mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini maka akan semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang (Myrdal dalam M.L Jhingan, 1993).

Dampak balik atau *backwash effect* merupakan semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Kondisi ini terjadinya karena aliran modal, penduduk, dan barang jasa dari wilayah maju ke wilayah terbelakang ataupun wilayah terbelakang ke wilayah maju hanya menguntungkan wilayah maju saja, akan tetapi menekan kegiatan ekonomi di wilayah terbelakang. Dampak sebar atau *spread effect* menunjukkan pada proses pembangunan yang menyebar dimana modal, penduduk, dan barang jasa mengalir dari wilayah maju ke wilayah terbelakang sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk keduanya maka hal inilah yang menyebabkan keseimbangan pembangunan wilayah. Maka dampak balik atau *backwash effect* ini cenderung mengarah kepada pertumbuhan suatu wilayah yang hanya memiliki potensi dalam pembangunan saja sedangkan dampak sebar atau *spread effect* ini arah penyebarannya dari titik pusat pertumbuhan ke daerah-daerah yang berada di sekitarnya, hal inilah yang menjadi dampak sebar yang luas. Penyebab utama

ketimpangan pembangunan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1993).

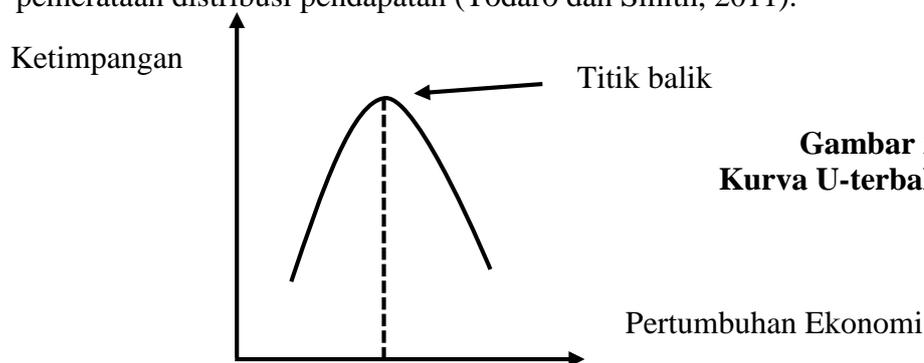
Menurut Myrdal dalam Arsyad (2010:377) pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang dapat menimbulkan hambatan lebih besar pada daerah-daerah terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Suatu keadaan yang menghambat pembangunan digolongkan sebagai *backwash effect*. Akan tetapi perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan bagi daerah-daerah yang lebih miskin atau *spread effect*.

2.1.4.2.4 Hipotesis Kuznets

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara tersebut agar dapat menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut ditentukan karena adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tekanan yang ada (Todaro, 2004).

Kuznets (1957) dalam Tambunan (2003:84) hipotesisi U terbalik merupakan hipotesa yang terkenal yang dikemukakan oleh kuznets. Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara didunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terdapat *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu penyerapan tenaga kerja sangat kecil.

Adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan diperkuat dengan adanya hipotesis Kuznets yang diperkenalkan oleh Simon Kuznets merupakan ekonom Neo Klasik. Hipotesis ini digambarkan dengan kurva U-terbalik, karena bentuk kurva tersebut seperti huruf U yang terbalik. Dalam hipotesis ini, kurva menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dengan pemerataan distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2011).



Gambar 2. 1
Kurva U-terbalik Kuznets

Sumber: Todaro dan Smith (2011)

Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan cenderung menurun atau memburuk, namun distribusi pendapatan akan meningkat dan membaik pada tahap selanjutnya. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan tidak hanya dilihat dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dilihat juga dari karakter pertumbuhan yang ada di daerah tersebut. Karakter ini meliputi apa saja yang dicapai, siapa yang ikut berkontribusi untuk menciptakan pertumbuhan, sektor mana yang ingin dikembangkan dan lainnya. Nantinya karakter tersebut yang akan menentukan apakah pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan standar hidup orang miskin yang nantinya dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang ada di daerah tersebut (Todaro dan Smith, 2011).

2.1.5 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan pembangunan wilayah biasa terjadi dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Dasar dari adanya ketimpangan karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang berbeda-beda pada setiap wilayah (Sjafrizal, 2008). Pembangunan ekonomi daerah atau regional memiliki tujuan yang bersifat multidimensional, yaitu menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan kondisi sosial, mengurangi ataupun menghapus kemiskinan, ketimpangan (*disparity*), dan pengangguran (Todaro, 2000) dalam (Ragil, 2018:351).

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah pertama kali dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut, dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2008:104).

Dalam hipotesis Neo-Klasik, pada awalnya proses pembangunan suatu negara, yaitu tingkat ketimpangan pembangunan di antar wilayah akan cenderung mengalami peningkatan dan akan terus terjadi sampai ke titik puncak. Jika pada proses pembangunan terus berlanjut, maka dari waktu ke waktu ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mengalami penurunan (Sjafrizal, 2008:105).

Menurut Sjafrizal (2008:107) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam (SDA)

Adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan SDA pada masing-

masing wilayah akan mempengaruhi terhadap kegiatan produksi di daerah yang bersangkutan. Jika dalam daerah tersebut terdapat kandungan SDA yang cukup tinggi maka mereka dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang dikeluarkan relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan SDA lebih rendah. Kondisi inilah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang memiliki SDA lebih kecil hanya dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi maka daya saing menjadi lemah.

2. Perbedaan kondisi demografis

Kondisi yang dimaksudkan adalah perbedaan dari tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan dari tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, tingkah laku, dan etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kondisi ini akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena dapat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja masyarakat.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan di antar daerah dan migrasi baik yang didanai oleh pemerintah. Bila mobilitas tidak mengalami hambatan maka produksi yang masih tersedia atau kelebihan produksi di suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang lebih membutuhkan. Disisi lain, jika migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketimpangan antar wilayah cenderung tinggi, karena

adanya kelebihan suatu daerah tidak bisa dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunan.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi ketika tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih cepat di daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan yang terbilang besar. Penyebab dari konsentrasi ini antara lain adanya SDA yang lebih tinggi di suatu daerah dibanding daerah lain, terjadinya pemerataan fasilitas transportasi baik itu darat, laut, dan udara, adanya kondisi demografis atau kependudukan karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi pada saat kualitas sumber daya manusia yang tersedia lebih baik.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah ditentukan oleh sistem yang dianut dan diantaranya, sistem pemerintahan bersifat sentralistik yaitu alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan ke pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Adapun sistem pemerintah otonomi atau federal yaitu alokasi dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan akan cenderung rendah. Adapun alokasi pemerintah yang dapat memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain, alokasi dana untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur atau jalan, listrik dan irigasi. Semua sektor akan memberikan dampak pada peningkatan

produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan nantinya akan dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di wilayah tersebut.

2.1.5.1 Indeks Williamson

Indeks Williamson (IW) merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisis disparitas antar daerah. Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah awal ditemukan yaitu *williamson index* yang digunakan dalam studinya tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini merupakan *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *williamson index* muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mulanya menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks ketimpangan williamson ini merupakan analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan produk domestik bruto per kapita sebagai data dasar. Rumus untuk menghitung indeks ketimpangan william adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:107):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita di Kabupaten/Kota i

Y = PDRB rata-rata per kapita di Provinsi

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota i

n = Jumlah penduduk Provinsi

Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, dimana tingkat ketimpangan yang diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1, jika hasil semakin mendekati 0 (nol) maka ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY semakin rendah atau pertumbuhan ekonomi regional terjadi secara merata. Akan tetapi jika indeks williamson mendekati angka 1 (satu) maka tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY semakin tinggi atau hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata.

2.1.6 Tipologi Klassen

Analisis tipologi kelas merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing suatu wilayah. Indikator utama yang dapat digunakan yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal. Berikut klasifikasi daerah menurut tipologi kelas menjadi empat kuadran wilayah, yaitu (Sjafrizal, 2008):

1. Kuadran I, daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*).
2. Kuadran II, daerah berkembang cepat (*high growth but low income*).
3. Kuadran III, daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*).
4. Kuadran IV, daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Pendekatan wilayah tipologi kelas ini mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, biasanya merupakan daerah-daerah yang memiliki potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran masyarakat daerahnya, diperkirakan daerah ini akan terus mengalami perkembangan di masa mendatang.
2. Daerah berkembang cepat, memiliki potensi pengembangan yang besar akan tetapi belum dapat diolah dengan baik. Walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapita yang mencerminkan tahap pembangunan telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain. Diperkirakan daerah ini akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah maju.
3. Daerah maju tapi tertekan, daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama di daerah tersebut. Walaupun potensi pembangunan yang dimiliki besar akan tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat.
4. Daerah relatif tertinggal, tingkat kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Akan tetapi melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah juga tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat mengejar ketertinggalannya.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Pada tabel dibawah akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Melalui penelitian terdahulu, penulis dapat memperkaya teori yang digunakan agar dapat mendukung penelitan.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti (Tahun) dan Judul | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|-----|---|---|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Noviar. (2021). Analisis Ketimpangan dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. | Menggunakan alat analisis indeks williamson dan tipologi klassen. | Objek penelitian, tidak memakai alat analisis korelasi pearson, dan hipotesis kuznets. | Hasil analisis indeks williamson, menunjukan angka indeks yang selalu berada di atas angka 0,7, menunjukan adanya ketimpangan pembangunan tidak merata dan cukup tinggi antar kab./ kota di Provinsi Banten, dan klasifikasi daerah yang cepat berkembang ada 5 kab./kota, 1 daerah cepat maju dan tumbuh pesat, 1 daerah maju tapi tertekan, dan ada daerah yang relatif tertinggal. | Jural Kebijakan Pembangunan Daerah. Vol. 5, No.1, 2021. |
| 2. | Umiyati, Etik. (2014). Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Pulau Sumatera. | Menggunakan alat analisis indeks williamson, dan tipologi klassen | Objek penelitian, tidak menggunakan analisis korelasi pearson dan hipotesis kuznet. | Hasil indeks williamson, Provinsi Kep. Riau dan Provinsi Riau angka indeks relatif tinggi dan ketimpangan Provinsi lainnya reatif merata. Provinsi yang unggul di sektor pertambahan ialah Provinsi NAD, dan di Pulau Sumatra ini | Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.9, No.2, 2014. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|---|---|---|--|
| | | | | didominasi oleh sektor pertanian juga pertambangan. | |
| 3. | Septiani, I. Y., & Endang. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020. | Alat analisis tipologi klassen dan indeks williamson (IW) | Objek penelitian, tidak menggunakan analisis korelasi pearson, dan hipotesis kuznet. | Hasil tipologi klassen ada 9 kab/kota terletak di kuadran I, di kuadran II ada 1 kab/kota, 15 kab/kota di kuadran III, dan 13 kab/kota di kuadran IV. Tingkat ketimpangan perhitungan perhitungan IW tahun 2016-2020 rata-rata mencapai 0,95 maka ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tinggi. | JEMES-Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial. Vol. 5, No.1, 2022. |
| 4. | Ekwarso, H., Taryono., & Isyandi. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah Kecamatan di Kota Dumai. | Alat analisis indeks williamson | Objek penelitian, tidak menggunakan tipologi klassen, korelasi pearson, hipotesis kuznet, dan tambahan perhitungan pendapatan per kapita. | Pendapatan tertinggi di Kec. Dumai Barat dan terendah di Kec. Sungai Sembilan. Ketimpangan antar wilayah Kec. Di Kota Dumai dalam kategori rendah namun cenderung meningkat. | Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, tahun VII, No.19, Hal 1-16. |
| 5. | Dewi, Ida Ayu., et al. (2014). Analisis Ketimpangan Pembangunan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. | Alat analisis IW, tipologi klassen, korelasi pearson, dan hipotesis Kuznets | Objek penelitian | Analisis IW, ketimpangan tahun 2002-2011 yaitu 0,68 menunjukkan angka ketimpangan pembangunan tinggi. Hasil tipologi klassen daerah maju dan tumbuh cepat (Denpasar, Gianyar dan Buleleng); maju tapi tertekan (Klungkung); dan daerah tertinggal (Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem). Hipotesis Kuznets kurva U terbalik tidak berlaku di Provinsi Bali. | E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol. 03, No.02, Hal. 68-80. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--|--|---|--|
| 6. | Mallarangang, Ikrar. (2018). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2011-2015. | Alat Analisis IW. | Objek Penelitian, tidak menggunakan tipologi klassen, korelasi pearson, hipotesis kuznets, dan tambahan analisis indeks theil. | Analisis IW tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan berada di atas angka nol dan periode 2011-2015 mengalami peningkatan. indeks theil terjadi ketimpangan yang sangat tinggi di sektor industri dibandingkan dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jasa lainnya. | Jurnal Kritis Vol. II, No.1Edisi April 2018.ISSN 2579-7875 Universitas Muslim Indonesia Makassar |
| 7. | Putri, N.T & Almahmudi, Aris. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Bengkulu (Telaah Posisi 3 Kabupaten Induk). | Alat analisis IW dan tipologi klassen. | Objek penelitian, tidak menggunakan korelasi pearson, dan hipotesis kuznets. | Berdasarkan hasil IW Provinsi Bengkulu tahun 2002, 2007, dan 2016 memiliki angka ketimpangan 0,34; 0,40, dan 0,37. Pemekaran wilayah dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi ataupun sebaliknya. Tipologi klassen kab/kota tahun 2016 Kota Bengkulu selalu berada di kuadran kota maju dan tumbuh cepat. Bengkulu Utara, Rejang Lebong Seluma & Lebong berada di kab/kota kurang berkembang. | <i>Convergence: The Journal Of Economic Development</i> Vol.2, No.1, Hal.70-90, July 2020. ISSN 2721-6330. |
| 8. | Islami, Fitrah Sari. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. | Alat analisis indeks williamson. | Objek penelitian, tidak menggunakan alat analisis tipologi klassen, hipotesis kuznets, tambahan menggunakan regresi. | Hasil IW 2001-2015 ketimpangan wilayah antar kab/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi dan cenderung tinggi karena mendekati angka 1. Hasil regresi variabel | Media Ekonomi dan Manajemen Vol.33 No.1 2018. Hal. 29-39 ISSN 2503-446 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | pertumbuhan ekonomi negatif tidak signifikan, investasi negatif signifikan, dan IPM positif tidak signifikan. | |
| 9. | Madina, Mutia. & Muzdalifah. (2020). Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Regional di Kalimantan (Pendekatan Shift Share) | Alat analisis tipologi klassen. | Objek penelitian, tidak menggunakan alat analisis IW, korelasi pearson, hipotesis kuznet, tambahan <i>regional share, proportional shift, competitive shift</i> dan regresi. | Hasil tipologi klassen Kalimantan Utara pada tahun 2015-2016 menjadi daerah maju tapi tertekan, dan yang tergolong ke dalam daerah tertinggal adalah Kalimantan barat. <i>Regional share</i> , dan <i>competitive shift</i> tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan, <i>proportional shift</i> mempengaruhi ketimpangan pembangunan. | Ecoplan Vol. 3. No. 1, April 2022, hlm 22-25. ISSN 2615-5575. |
| 10. | Dhyatmika, Ketut Wahyu. Atmanti. H.D. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. | Alat analisis IW dan tipologi klassen. | Objek penelitian, tidak menggunakan korelasi pearson, hipotesis kuznets, dan tambahan regresi. | Hasil IW ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten cenderung meningkat. Tipologi klassen, klasifikasi daerah maju dan tumbuh cepat adalah Kota Cilegon dan Kota Tangerang, adapun daerah tertinggal adalah Kab. Pandeglang, Lebak, dan Serang. Variabel PMA berpengaruh positif. Pengeluaran pemerintah negatif dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten. | <i>Diponegoro Journal Of Economics</i> Vol. 2, No. 2. 2013. 1-8. |
| 11. | Sari, Puput DK. Budhi, Made K,S. (2013). Pertumbu- | Alat analisis tipologi klassen, IW, | Objek penelitian. | Hasil tipologi klassen, daerah tumbuh cepat tapi | E-Jurnal EP Universitas |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|------------------------------------|--|--|--|
| | han Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Buleleng. | korelasi pearson, hipotesis kuznet | | tidak maju terdiri dari Kec. Gerokgak, Seririt, Sukasada, Buleleng, Kubutambahan. Daerah relatif tertinggal terdiri dari Kec. Busungbiu, Banjar, Sawan, dan Tejakula. Selama periode 2007-2011 hasil analisis IW ketimpangan pembangunan di Kab. Buleleng cukup kecil. Adanya hubungan negatif antara IW dan pendapatan per kapita. Hipotesis Kuznet di Kab. Buleleng tidak berlaku. | Udayana, 2[3]:164-172. ISSN 2303-0178. |
| 12. | P. Osi Hayuni & Pitri, Nani.E. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Jawa Tahun 2010-2020. | Alat analisis tipologi klassen. | Objek penelitian, tidak menggunakan alat analisis IW, korelasi pearson, hipotesis kuznet, dan tambahan alat analisis indeks theil. | Hasil indeks theil, nilai ketimpangan di wilayah Jawa 2010-2020 relatif rendah dengan jumlah rata-rata 0,14. Hasil tipologi klassen, daerah cepat maju dan cepat tumbuh (DKI Jakarta), daerah berkembang cepat (Jabar, Jatim cepat (Jabar, Jatim, dan Banten), daerah relatif tertinggal (Jateng, dan DIY). | Jurnal STIE Sakti Alaman Kerinci. Agregat Vol.4 (2) Sep.2021 . |
| 13. | Fitriyah, Lailatul. Rachmawati Lucky. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur. | Alat analisis IW | Objek penelitian, tidak menggunakan alat analisis tipologi klassen, korelasi pearson, dan hipotesis kuznet. | Gambaran umum PDRB, Kota Surabaya memiliki PDRB tertinggi dan Kota Mojokerto memiliki PDRB terendah. Hasil IW adanya ketimpangan pembangunan yang tinggi mendekati 1. | <i>E-Journal Unesa</i> . Vol.1, No.3 (2013). |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--|---|---|---|
| 14. | Hadju, Ingli, I., et al. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara | Alat analisis IW | Objek penelitian, tidak menggunakan alat analisis tipologi klassen, korelasi pearson, dan hipotesis kuznet. | Hasil analisis IW, ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yaitu dengan nilai 0,50. | Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.21, No. 01, Juli2021. Hal 110-120. |
| 15. | Ragil, Candra. (2018). Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/ Kota Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2013-2016. | Objek penelitian dan alat analisis IW. | Tahun penelitian, tidak menggunakan alat analisis tipologi klassen, korelasi pearson, dan hipotesis kuznet. | Hasil penelitian dari perhitungan IW antar kab./kota di Provinsi DIY menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi yaitu 0,824. | <i>Journal ITNY</i> . Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Hal 350-356. ISSN 1907-5995. |

2.2 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu keberhasilan dan target yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan daerahnya pasti berbeda-beda karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut juga berbeda. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah ini salah satunya disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak merata, maka ketidakmerataan ini yang nantinya akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Seperti halnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hanya menitik beratkan pembangunan ekonominya di daerah Kota Yogyakarta saja. Ketimpangan pembangunan daerah ini diakibatkan oleh adanya perbedaan potensi dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan dari masing-masing penduduk di daerahnya.

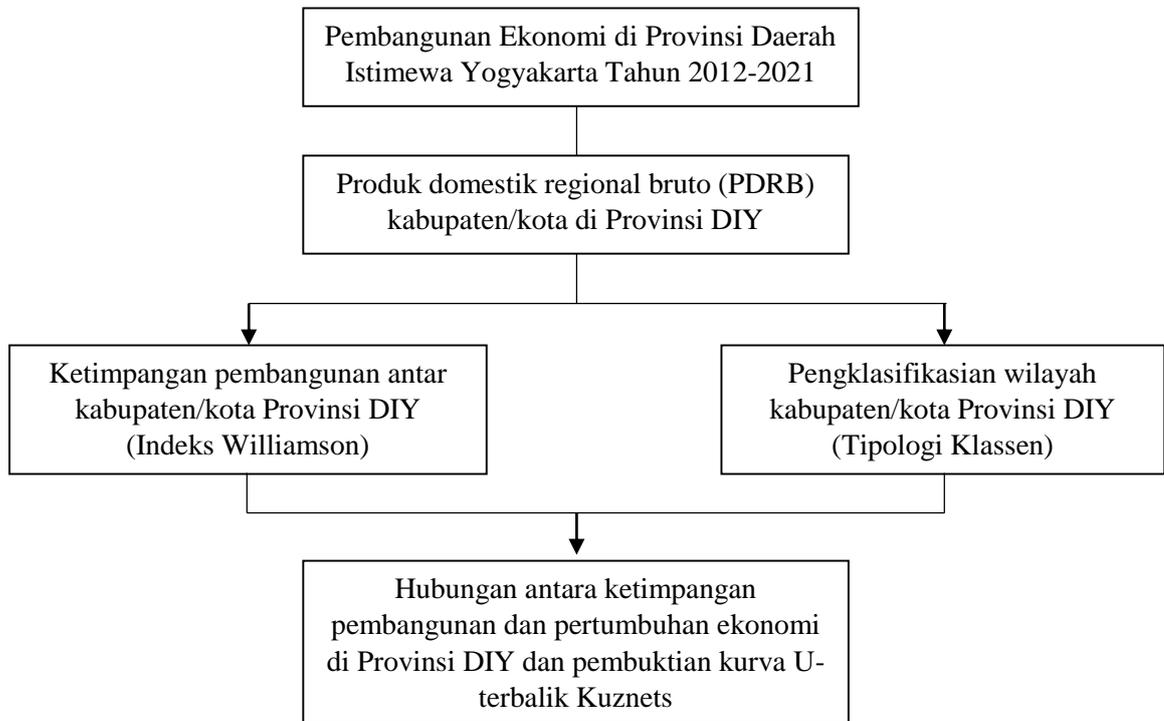
Berdasarkan penelitian sebelumnya, membuktikan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah berbeda-beda. Salah satunya yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Syaifudin, et al) berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 tergolong tinggi, yaitu sebesar 0,66 dan berdasarkan tipologi klassen sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Barat berada dalam golongan daerah yang berkembang.

Maka untuk menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ialah dengan menggunakan alat analisis indeks williamson. Indeks williamson ini merupakan alat analisis untuk mengukur dan menganalisis disparitas antar daerah. Adapun untuk menentukan pola dan struktur pengklasifikasian wilayah dengan menggunakan alat analisis tipologi klassen yang diharapkan membantu pemerintah daerah maupun provinsi dalam mengatur daerah mana yang menjadi skala prioritas dan dapat dikembangkan, karena hal ini akan dapat membantu dalam mengurangi dan menanggulangi tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi DIY. Selanjutnya penulis menggunakan korelasi pearson atau korelasi *product moment* untuk mengetahui hubungan antara indeks williamson dengan PDRB perkapita di Provinsi DIY. Terakhir hipotesis U terbalik kuznets akan menjelaskan bahwa apakah kurva U terbalik berlaku di Provinsi DIY.

Secara sistematis untuk mempermudah penelitian ini, penulis merasa perlu membuat kerangka berpikir agar dapat menjelaskan analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

menggunakan analisis indeks williamson, tipologi klassen, dan korelasi pearson.

Berikut merupakan skema kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap suatu permasalahan serta untuk mengetahui kebenarannya harus melalui penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan antara ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY.
2. Diduga kurva U-terbalik Kuznets berlaku di Provinsi DIY.

